



## **BAB IV**

# **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

Melihat dinamika perkembangan yang ada, Provinsi Kalimantan Timur saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, kendala, dan faktor penghambat yang berdampak dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kurang optimalnya implementasi dalam realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depan.

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 telah memasuki akhir periodik dimana pelaksanaan pembangunan telah berada pada tahun 2017 dan akan berakhir pada tahun 2018. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sendiri.

Penting adanya penjabaran secara umum namun relevan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional era Presiden Ir. Joko Widodo untuk menyusun berbagai kebijakan dalam RKPD 2018. Hal ini mencerminkan sebuah integrasi baru antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen perencanaan jangka menengah nasional melalui hirarki perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2018 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan perubahan



perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakomodir perubahan kebijakan level nasional, utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Bab ini membahas tentang prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan skala prioritas paling tinggi (*output & outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian akan dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal untuk selanjutnya disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan.

#### **4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan dan penyempurnaan kebijakan agar dalam pembangunan selalu mengalami peningkatan capaian kinerja. Perubahan kebijakan ini semakin nyata terlihat ketika pergantian presiden dan wakil presiden dimana setiap visi dan misi yang diembannya memiliki beberapa perbedaan dengan pendahulunya.

Perbedaan pandangan kebijakan ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan selama masih mengacu pada pokok pembangunan jangka panjang nasional, utamanya sesuai peraturan perundang-undangan nasional yang masih berlaku. Meskipun demikian, perubahan kebijakan ini memiliki berbagai dampak, baik itu dari sisi negatif maupun positif, ketika dihierarki vertikal ke bawah, yaitu terhadap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu ada kajian dan analisa kembali terhadap kebijakan nasional sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam merevisi dan merumuskan berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Saat ini, Pemerintahan Republik Indonesia berada pada periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan



nasional, yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti merupakan acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara profesional, konsekuen, dan berkesinambungan. Azimat Trisakti mencakup: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, tiga Azimat **TRISAKTI** dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut:

#### **BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK**

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama).
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama).
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama).
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama).
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama).
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama).
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama).
8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama).
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama).
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama).
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama).
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama).

#### **BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI**

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama).
2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan (4 prioritas utama).
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama).
4. Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama).
5. Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama).



6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama).
7. Penguatan investasi sumber domestik (10 prioritas utama).
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama).
9. Penguatan infrastruktur (40 prioritas utama).
10. Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama).
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama).
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan (7 prioritas utama).
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama).
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama).
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama).
16. Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama).

#### **BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN**

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama).
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama).
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama).

Ketiga azimat Trisakti ini secara terintegrasi akan memberikan suatu motivasi utuh kepada setiap pelaksana sektoral pemerintahan pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional juga dirumuskan Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas sebagai landasan berkehidupan. Hal ini diwujudkan dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan sesuai harapan serta tercapai target yang diinginkan. Berikut Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019:

#### **VISI:**

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN  
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

#### **MISI:**



1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan, yang kemudian disebut dengan **NAWA CITA**, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Sebagai sebuah agenda prioritas nasional, NAWA CITA akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari beberapa inovasi-inovasi kebijakan yang terangkum dalam agenda prioritas yang secara tidak langsung memberikan “perintah” bagi daerah untuk menaatinya. Inovasi yang cukup fenomenal bagi masyarakat Indonesia dan memberikan warna tersendiri bagi perencanaan pembangunan daerah adalah jargon “Revolusi Mental” yang diusung oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada setiap perumusan kebijakannya.

Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD tahun 2018 akan mengakomodir perubahan dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah diubah dan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Hal ini dilakukan karena pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur masih menggunakan kebijakan pembangunan nasional presiden terdahulu, sehingga untuk meng-*up date* setiap arahan pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan.

Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2018 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman arah kebijakan pembangunan tahun 2018 yang merupakan turunan dari penajaman arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

**Tabel 4.1**

**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	<b>Strategi 11 :</b> Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya		
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	<b>Strategi 1 :</b> Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
5	Melakukan revolusi karakter bangsa		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	<b>Strategi 2 :</b> Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	4	<b>Strategi 3 :</b> Percepatan Pengentasan Kemiskinan
		5	<b>Strategi 4 :</b> Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	<b>Strategi 5 :</b> Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
		7	<b>Strategi 7 :</b> Peningkatan Skala Produksi Pertanian
		8	<b>Strategi 6 :</b> Percepatan Transformasi Ekonomi
		9	<b>Strategi 8 :</b> Peningkatan Produksi Pangan
		10	<b>Strategi 9 :</b> Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
		11	<b>Strategi 12 :</b> Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	12	<b>Strategi 10 :</b> Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Penajaman arah kebijakan (prioritas dan sasaran) untuk tahun 2018 ini akan memberikan suatu sinkronisasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus akan memberi percepatan pencapaian target jika dilaksanakan secara utuh dan



optimal. Penajaman arah kebijakan ini juga harus diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memegang penyesuaian kebijakan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Sesuai dengan arahan RPJMN tahun 2015-2019 maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 sesuai dengan RPJMN 2015-2019, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 - 6,6 persen.
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 3,4 - 3,2 persen.
3. Pencapaian target pengangguran sebesar 6,0 - 5,6 persen.

### **3.2 Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019**

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan.

Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas sebagai penunjang



pengembangan wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kalimantan Timur dalam kancah pembangunan nasional. Kemudian, pengembangan wilayah Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **A. Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan**

Berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar “Pembangunan Wilayah Kalimantan” adalah:

- 1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
- 2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
- 3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; serta
- 4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan**

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya: pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
2. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan;
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan;
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dibangun 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif, dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3



sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan, dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur; (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Kalimantan, dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur; serta

8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri, maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagai realisasi bentuk pencapaian visi dan misi pembangunan, disusunlah target prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019, sebagaimana tampak pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target Prioritas Pembangunan Nasional Kalimantan**  
**Tahun 2015-2019**

NO	SASARAN NASIONAL	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	5,6	5,6	6,4	7,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5
3	Tingkat Pengangguran (%)	8,4	8,0	7,6	7,2	6,9

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Jika menyandingkan target RPJM Nasional untuk regional Kalimantan pada tahun 2018 dengan target RKPD yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, maka terlihat perbedaan yang menjelaskan melalui fenomena maupun data dan informasi. Perbedaan tersebut sebagian besar karena karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada Pulau Kalimantan dimana sumber daya alam yang melimpah namun mengingat sumber daya alam tersebut tidak dapat terbaharui maka semakin lama pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal tersebut disebabkan oleh dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menurunnya produksi pertambangan dan penggalian akan berakibat signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Poin penting dalam target sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah target pertumbuhan ekonomi dengan migas yang mengalami perubahan dikarenakan isu strategis terkait lingkungan hidup yang menurunkan permintaan ekspor batubara, seperti dari Negara Tiongkok, meskipun terjadi perluasan ekspor ke Negara India. Selain itu, menurunnya eksplorasi dan produksi sektor pertambangan dan batubara, baik batubara, minyak bumi, maupun gas alam menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan dan otomatis mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh. Berikut sasaran target nasional dan target Provinsi Kalimantan Timur yang telah direvisi pada tahun 2016 ini, dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Sasaran	Target Tahun 2018	
		Nasional	Provinsi Kalimantan Timur
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,4	4±1
2	Tingkat Kemiskinan	3,9	6,00
3	Tingkat Pengangguran	7,2	7,00

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

#### 4.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi, baik dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Gubernur Kalimantan Timur.

Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan, khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan itu sendiri merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan



dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi Gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2018.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment*.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan Provinsi.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2018.
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dokumen RPJMD, utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas serta sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan.

**RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018** merupakan **penjabaran tahun kelima** dari **RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**. Memedomani dokumen RPJMD, tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2018. Tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah:

- **Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kalimantan Timur**

Pendidikan memegang peranan kunci dalam pembangunan sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan daerah. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada suatu



daerah. Pembangunan Sumber daya manusia dilakukan melalui upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun informal, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas dalam kemampuan tetapi juga mempunyai akhlak dan mental yang tangguh.

Provinsi Kalimantan Timur, dalam pencapaian pendidikan, telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik sebagaimana terwujud dalam pemberian beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka melek huruf. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2010 pemerintah telah mencanangkan program Wajib belajar 12 tahun. Program ini harus terus dilanjutkan dan dituntaskan agar anak-anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan sehingga lebih berdaya saing. Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja. Upaya penting berikutnya untuk meningkatkan pendidikan adalah dengan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas dan lengkap di semua daerah, terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. **Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia**, dengan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia **sebesar 75,70**;
2. **Meningkatnya harapan lama sekolah**, dengan capaian indikator angka harapan lama sekolah **sebesar 14,00 tahun**;
3. **Meningkatnya rata-rata lama sekolah**, dengan capaian indikator rata-rata lama sekolah **menjadi 12 tahun**; dan
4. **Meningkatnya angka harapan hidup**, dengan capaian angka harapan hidup **sebesar 74,00 tahun**.

- **Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**





Kesejahteraan masyarakat yang merata merupakan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kesejahteraan mempunyai arti terpenuhinya segala aspek kebutuhan hidup manusia, jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat serta kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi daerah yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Adapun kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang hidup dengan nyaman, tenang, damai, saling memahami, dan mampu bertoleransi dengan baik dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing. Dengan pemahaman tersebut maka akan terwujud masyarakat yang sejahtera dan secara tidak langsung menunjukkan keadaan perekonomian masyarakat yang baik, derajat kesehatan yang tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Dengan masyarakat sejahtera, terjamin hak-haknya, mempunyai kesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta kebutuhan hidup yang layak.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kualitas kesehatan masyarakat yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur juga harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat terjangkau pelayanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Hingga saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai melalui beberapa sektor, seperti; sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

1. **Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 6,00 persen;**
2. **Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 7,00 persen;**
3. **Meningkatnya standar hidup layak, dengan capaian paritas daya beli sebesar 11.800 ribu per kapita/tahun;**
4. **Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat tingkat inflasi sebesar  $4 \pm 1$  persen dengan Indeks Tendensi Konsumen sebesar 106,8 ; dan**
5. **Menurunnya Indeks Gini, dengan capaian indeks gini sebesar 0,32.**

• **Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya, melalui: pengurangan emisi GRK, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, memberikan peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata, serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi. Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan timur dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi yang berkelanjutan dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan dan hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar  $0,5 \pm 1$  persen (LPE migas),  $1 \pm 1$  persen (LPE non migas), dan  $4 \pm 1$  persen (LPE non migas dan non batubara);**
2. **Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dengan capaian indikator kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 10,00 persen dan didukung pula dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas sebesar  $5 \pm 1$  persen;**
3. **Tercapainya swasembada pangan, dengan capaian indikator rasio pemenuhan beras sebesar 85,00 persen; dan**
4. **Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan, dengan capaian indikator bauran energi baru terbarukan sebesar 3,00 persen.**

- **Tujuan 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi barang dan penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 7,00”**.

- **Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance*



harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah. Sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. **Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,00 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;**
2. **Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 85 (sangat baik); dan**
3. **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 80,00 (A) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”.**

- **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukung lingkungannya. Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran **meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan**, dengan capaian indikator kinerja:

1. **Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 82,00; dan**
2. **Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca , dengan indikator Intensitas Emisi sebesar 1.650 ton CO<sub>2</sub>/US \$ juta PDRB.**

**Tabel 4.4**  
**Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

<b>VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN</b>				
<b>Sasaran</b>		<b>Indikator Sasaran (Satuan)</b>	<b>Target Awal (2013)</b>	<b>Target 2018</b>
<b>Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi</b>				
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim</b>				
1	<b>Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>IPM</b>	<b>73,21</b>	<b>75,7</b>
2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	14
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata sekolah (tahun)	8,87	12
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	73,52	74
<b>Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan</b>				
<b>Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat</b>				
5	<b>Menurunnya tingkat kemiskinan</b>	<b>Tingkat kemiskinan (%)</b>	<b>6,06</b>	<b>6</b>
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	7
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)	10.981	11.800
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	4 $\pm$ 1
		Indeks Tendensi Konsumen	112,29	106,8
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	<b>0,37</b>	0,32
<b>Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan</b>				
10	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)</b>	<b>2,25</b>	<b>0,5<math>\pm</math>1</b>
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,45	1 $\pm$ 1
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	5,99	4 $\pm$ 1
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Share sektor pertanian dalam arti luas (%)	5,65	10
		Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	6,44 $\pm$ 1	5,00 $\pm$ 1
12	Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72	85



VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN				
Sasaran		Indikator Sasaran (Satuan)	Target Awal (2013)	Target 2018
13	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	3
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata				
Tujuan 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas				
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5	7
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik				
Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				
15	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,2	6
		Opini BPK	WTP	WTP
16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 ,00	85
			(baik)	(sgt baik)
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	80,00 (A)
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi (2-3)	Sangat Tinggi (3-4)
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim				
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
18	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	82
19	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	1.500	1.650

Sumber: Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

#### 4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Optimisme pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan efek positif pada pelaksanaan hierarki pembangunan daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan akan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi pada

dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan pemerintah Provinsi (termasuk Perangkat Daerah) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018 serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2018 untuk beberapa indikator utama pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota**  
**Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran	Tingkat Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Samarinda	80,01	3,90	4,06	4,00
2. Balikpapan	78,73	2,14	5,30	2,33
3. Bontang	78,91	6,50	11,06	4,62
4. Berau	76,34	7,00	4,93	4,51
5. Paser	71,31	2,00	7,98	7,86
6. PPU	71,12	4,70	6,01	7,60
7. Kutai Barat	71,21	2,01	6,54	5,00
8. Kutai Timur	72,05	3,76	1,01	6,12
9. Kutai Kartanegara	74,64	5,08	8,93	6,22
10. Mahakam Ulu	66,50	5,00	6,75	7,25

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Prioritas pembangunan Kaltim pada tahun 2018 difokuskan kepada daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator Makro 3 (tiga) terbawah. Dengan fokus kewilayahan terhadap Kabupaten/Kota yang masih memiliki indikator rendah ini diharapkan Kabupaten/Kota tersebut nantinya tidak semakin tertinggal dibanding Kabupaten/Kota lainnya se-Kalimantan Timur. Pemerataan pembangunan dan peran serta Provinsi akan semakin nyata dirasakan oleh Kabupaten/Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari RPJMD 2013-2018 yang memiliki skala prioritas pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat (RPJM Nasional yang dijabarkan kembali dalam RKP). Proses ini akan meningkatkan



keselarasan dan integrasi dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pada intinya, dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Dengan memedomani pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 maka fokus RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Tahun 2013-2018**



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2018 adalah **“Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata”** sebagai bagian dari tahapan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Agar dokumen RKPD tahun 2018 sinkron dan selaras dengan RPJMD 2013-2018 serta RKPD tahun-tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2018 perlu memperhatikan:

- Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2013-2018 yang belum tercapai;
- Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2018;
- Identifikasi target-target pembangunan RKPD tahun 2017 yang belum tercapai;
- Identifikasi isu strategis dan kebijakan nasional (RKP Tahun 2018); dan
- Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 mempunyai prioritas pembangunan yang mengacu pada prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2018, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur 2018**

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2018	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	<b>Strategi 11 :</b> Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1.	Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerja aparatur
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya				
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya			2	Perbaikan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	<b>Strategi 1 :</b> Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	3	Peningkatan kompetensi guru
5	Melakukan revolusi karakter bangsa			4	Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar
				5	Peningkatan kesempatan belajar
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	<b>Strategi 2 :</b> Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	6	Peningkatan mutu di bidang kesehatan
		4	<b>Strategi 3 :</b> Percepatan Pengentasan Kemiskinan	7	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
				8	Penyediaan



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2018	
					infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	5	<b>Strategi 4 :</b> Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	9	Peningkatan Kualitas tenaga kerja
				10	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	<b>Strategi 5 :</b> Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	11	Peningkatan kestabilan harga dan efisiensi distribusi barang
				12	Penguatan kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis
				13	Penguatan Peran Pemda dalam fungsi stabilisasi harga
				14	Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa antar pusat kegiatan nasional (PKN)
		7	<b>Strategi 7 :</b> Peningkatan Skala Produksi Pertanian	15	Peningkatan ekspor produk unggulan daerah
				16	Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis
		8	<b>Strategi 6 :</b> Percepatan Transformasi Ekonomi	17	Peningkatan investasi daerah
				18	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2018	
					Proses Hulu Hilir)
				19	Peningkatan ekspor produk olahan
				20	Pembangunan prasarana jalan dan prasarana transportasi untuk mendukung kawasan strategis provinsi (KSP) Maloy dan KSP lain
		9	<b>Strategi 8 :</b> Peningkatan Produksi Pangan	21	Peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura
				22	Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
				23	Peningkatan infrastruktur pertanian
				24	Peningkatan produktivitas pertanian
		10	<b>Strategi 9 :</b> Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	25	Penyiapan regulasi untuk mendorong pengembangan EBT
				26	Peningkatan rasio elektrifikasi
		11	<b>Strategi 12 :</b> Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	27	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan
				28	Pengendalian pembangunan wilayah sesuai perencanaan tata ruang wilayah
				29	Peningkatan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2018	
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	12	<b>Strategi 10 :</b> Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	30	Pencegahan degradasi kualitas lingkungan hidup
				31	Penurunan emisi gas rumah kaca
				32	Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan
				33	Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman dan perbatasan
				34	Peningkatan kapasitas air baku dan air minum
				35	Pengendalian banjir dan daya rusak air

Sumber: Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Peningkatan kinerja pembangunan lintas bidang/sector maupun lintas wilayah secara kompleks dan menyeluruh memiliki tujuan dalam perwujudan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Sebagai wilayah yang memiliki cukup banyak daerah sulit/tertinggal, aksesibilitas intra dan antarwilayah merupakan “harga mati” bagi pengembangan perekonomian daerah secara adil dan merata. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, dalam meningkatkan distribusi orang, barang, dan jasa.

Pembangunan daerah yang optimal, efektif, dan efisien dapat dilakukan dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, terlebih lagi, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dengan keanekaragaman tipologi wilayah. Hal inilah yang menjadikan tantangan sekaligus permasalahan pokok pembangunan yang harus diantisipasi dan diselesaikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata.



Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, maka akan diupayakan pelaksanaan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal* secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dari keempat aspek tersebut, aspek *rethinking* merupakan aspek dominan dalam pencapaian reformasi birokrasi karena terkait dengan paradigma aparatur pemerintahan selama ini.

Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan perumusan perencanaan pembangunan mengingat pemerintahlah yang memiliki kewenangan dalam menyusunnya. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi segala kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perhatian pemerintah akan dokumen perencanaan kerja tahunan lebih ditingkatkan melalui reformasi birokrasi.

Dalam tahapan RPJMD tahun 2013-2018, RKPD tahun 2018 merupakan fase akhir yang memiliki keterkaitan antara awal dan akhir dari pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Segala kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2018 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2018 akan memberikan hasil yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal. Sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 RKPD 2018 mempunyai Program Prioritas Pembangunan sebagai berikut.



**Tabel 4.6**  
**Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018**

NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target 2018	PD
1	Meningkatnya IPM	Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan							
2	Meningkatnya angka harapan lama sekolah		Peningkatan kompetensi guru	Peningkatan kualitas pendidikan pengajar	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi	70.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah		Peningkatan kesempatan belajar masyarakat	Penuntasan Wajib belajar 12 tahun	2	Program pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	81.01	
							Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	90.01	
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Strategi 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan	Peningkatan mutu di bidang kesehatan	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan	3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses		Dinas Kesehatan





NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2018	PD
		kesehatan				pada obat-obatan anti retroviral		
						Persentase Keberhasilan Pengobatan TB		
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	Peningkatan kualitas infrastruktur tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu	4 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah RT miskin yang memiliki Rumah Layak Huni	60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
						Jumlah perumahan MBR yang dibantu jalan lingkungan oleh Pemerintah	5 Kawasan	
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha)	5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (WUB)	4000	Disperindag kop danUMKM



NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target 2018	PD
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Strategi 5 : Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis	Peningkatan kerjasama perdagangan dengan pemasok komoditas pangan	6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rasio Ketersediaan stok komoditi pokok dan barang strategis	150%	Disperindag kop danUMKM
8	Meningkatnya daya beli masyarakat		Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa antar pusat kegiatan nasional (PKN)	Percepatan distribusi arus barang dan jasa komoditas pokok masyarakat	7	Program pembangunan jalan tol	Jumlah jalan tol yang terbangun (Ketersediaan jalan tol (%))	42,23%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
9	Menurunnya Indeks Gini								
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi	Peningkatan investasi daerah	Pemangkasan birokrasi proses perijinan usaha	8	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2600 ijin/non ijin	Dinas Penanaman Modal dan KTSP
			Peningkatan nilai tambah produk	Pengembangan Klaster Industri Konstruksi dan	9	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan investasi industri	15%	Disperindag kop danUMKM



NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2018	PD
			pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)	Manufaktur				
			Peningkatan ekspor produk olahan	Pengembangan Jaringan Perdagangan	10 Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	4 UKM	Disperindag kop danUMKM
			Pembangunan prasarana jalan dan prasarana transportasi untuk mendukung kawasan strategis provinsi (KSP) Maloy dan KSP lain	Pengembangan aksesibilitas menuju kawasan strategis provinsi Kalimantan Timur	11 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%) (Panjang jalan untuk mendukung kawasan strategis dengan kapasitas daya mampu diatas 10 Ton)	42,84% (65,54 km)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
					12 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi	Jumlah fasilitas transportasi darat, laut, udara dan ASDP yang terbangun (2017-	1 pelabuhan maloy	Dinas Perhubungan



NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target 2018	PD
						darat, laut, udara dan ASDP	2018)		
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Strategi 7: Pengembangan agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian)	Peningkatan ekspor produk unggulan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi komoditas perkebunan	13	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (Juta Ha)	150617 Juta Ha	Dinas Perkebunan
							a. Karet	128740 ha	
							b. Kakao	10096 ha	
							c. Lada	11781 ha	
				Peningkatan nilai produksi komoditas perkebunan	14	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan Kelapa sawit	18 Ton/Ha	Dinas Perkebunan
							Produktivitas komoditas perkebunan karet	1.3 Ton/Ha	
							Produktivitas komoditas perkebunan kelapa	0.68 Ton/Ha	



NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2018	PD
						Produktivitas komoditas perkebunan kakao	0.77 Ton/Ha	
						Produktivitas komoditas perkebunan lada	1.1 Ton/Ha	
			Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis	Peningkatan nilai tambah produksi hasil perikanan kelautan	15 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya	116.759 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	72.000 ton	
12	Tercapainya swasembada beras	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	Peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Produksi Pertanian Padi, palawija dan hortikultura	16 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	Jumlah Produksi Padi (GKG) [Ton]	567300 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan infrastruktur pertanian	Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Pertanian	17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	5.000 Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura



NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target 2018	PD
						Pengairan Lainnya			
			Peningkatan produktivitas pertanian	Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi daging	18	Program peningkatan produksi peternakan	1. Peningkatan populasi ternak (%) :	56061,8 ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							- Sapi (%)	6	
							- Kerbau (%)	5	
							- Kambing (%)	7	
							- Babi (%)	5	
							- Ayam Buras (%)	6	
							2. Service per Conception (S/C)	2	
							3. Produksi biogas yang dihasilkan (m3)	36	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi ikan	19	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	163089 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan			
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan	Peningkatan rasio elektrifikasi	Peningkatan ketersediaan produksi energi listrik dan jaringan pendukungnya	20	Program Pengembangan ketenagalistrikan	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik	97.50%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2018	PD
	terbarukan							
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan	21 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	64,94%(1 057,26)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
			Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman dan perbatasan	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan	22 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana jalan	10 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
			Peningkatan kapasitas air	Peningkatan Kualitas dan	23 Program Penyediaan dan	Jumlah kecamatan terisolasi yang dapat diakses sarana & prasarana transportasi jalan dan jembatan	0 kecamatan	
						Kapasitas air baku (l/detik)	700 lt/dt	





NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target 2018	PD
			baku dan air minum	kapasitas pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan		pengelolaan air baku	Jumlah debit air baku yang dapat disalurkan	0 l/dtk	
				Pengembangan kualitas air baku dan air minum	24	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Kapasitas Air Bersih (L/detik)	680	
			Pengendalian banjir dan daya rusak air	Peningkatan antisipasi bencana banjir	25	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	415 Ha	
15	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerja aparatur	Optimalisasi kinerja aparatur sesuai efisiensi organisasi dan tata laksana	26	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85	Biro Organisasi
16	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja				27	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	Biro Pemerintahan
17	Meningkatnya	Strategi 12 :	Peningkatan	Rehabilitasi lahan	28	Program	Jumlah DAS	11 DAS	Dinas



NO.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target 2018	PD
	Indeks kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan	dan pelestarian kawasan hutan		Pengelolaan DAS dan RHL	prioritas yang dikelola secara terpadu		Kehutanan
18	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		Penurunan emisi gas rumah kaca	Pencegahan dan minimisasi pelepasan emisi gas rumah kaca sektor lahan, energi dan limbah	29	Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim	Jumlah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca	1317 ton CO <sub>2</sub> eq/1 Juta US\$	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)